



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jalan Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor – Sumedang Kode Pos 45363
Telp. (022) 7798252-7798253, Faximile (022) 7798256, Website www.ipdn.ac.id



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 800.2.3 – 445 TAHUN 2025

TENTANG

KURIKULUM PENGAJARAN, PELATIHAN, DAN PENGASUHAN

TERINTEGRASI PROGRAM SARJANA TERAPAN

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menyusun Kurikulum Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan kebijakan terbaru;
- b. bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Ilmu, Pengetahuan, dan Teknologi yang tercantum dalam capaian pembelajaran dan dirumuskan dalam jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c. bahwa untuk memperlancar proses pelaksanaan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan bagi Program Sarjana terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu ditetapkan Kurikulum Terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kurikulum Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan Terintegrasi Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG KURIKULUM PENGAJARAN, PELATIHAN, DAN PENGASUHAN PROGRAM SARJANA TERAPAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
- KESATU : Kurikulum Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan Terintegrasi Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Kurikulum Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan Terintegrasi Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku bagi satuan Praja Pratama Angkatan XXXVI Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2025/2026.

KETIGA : Penyusunan Kurikulum Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan formulasi:

- a. Pengajaran/Teori sebanyak 40% (empat puluh persen);
- b. Pelatihan/Praktikum sebanyak 50% (enam puluh persen); dan
- c. Pengasuhan/Praktikum sebanyak 10% (sepuluh persen).

KEEMPAT : Penyusunan Kurikulum Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan Terintegrasi Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada profil lulusan yaitu:

1. Fakultas Politik Pemerintahan:

- a. Program Studi Politik Indonesia Terapan yaitu ahli dalam analisis politik dalam negeri, pemerintahan umum, dan otonomi daerah;
- b. Program Studi Studi Kebijakan Publik yaitu ahli dalam analisis dan pembuatan kebijakan publik; dan
- c. Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu ahli dalam manajemen pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

2. Fakultas Manajemen Pemerintahan:

- a. Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah yaitu ahli dalam organisasi dan manajemen pemerintahan daerah;
- b. Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik yaitu ahli dalam manajemen kepegawaian;
- c. Program Studi Keuangan Publik yaitu ahli dalam mengelola keuangan daerah; dan
- d. Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan yaitu ahli dalam menganalisis, merencanakan,

mengoperasikan, dan mengelola sistem informasi pemerintahan.

3. Fakultas Perlindungan Masyarakat:

- a. Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong yaitu ahli dalam analisis penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman umum, dan penegakan peraturan daerah;
- b. Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu ahli dalam analisis dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- c. Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik yaitu ahli dalam manajemen bencana dan perlindungan masyarakat.

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Rektor ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Intitut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Adm. Hukum, Kepegawaian,
dan Hubungan Masyarakat

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd


Dr. Agus Toyib, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196808271990031003

HALILUL KHAIRI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di Jakarta;
5. Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Sumedang;
6. Kepala Biro Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Sumedang;
7. Dekan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Sumedang; dan

8. Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Internal, di Sumedang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR : 800.2.3 – 445 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 OKTOBER 2025
TENTANG : KURIKULUM PENGAJARAN, PELATIHAN, DAN PENGASUHAN TERINTEGRASI PROGRAM SARJANA TERAPAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

I. KURIKULUM FAKULTAS POLITIK PEMERINTAHAN PROGRAM STUDI STUDI KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM SARJANA TERAPAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

A. SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	KETERANGAN
			TEORI	PRAKTIK/ PRAKTIKUM		
1.	SKP 010101	Pancasila	2	0	2	MK Wajib Nasional
2.	SKP 010102	Agama	2	0	2	MK Wajib Nasional
3.	SKP 010103	Kewarganegaraan dan Wawasan Kebangsaan	2	0	2	MK Wajib Nasional
4.	SKP 020104	Pengantar Filsafat	2	0	2	Institut
5.	SKP 020105	Pengantar Ilmu Pemerintahan	2	0	2	Institut
6.	SKP 020106	Praktikum Bahasa Inggris I (<i>Basic</i>)	0	2	2	Institut
7.	SKP 020107	Praktikum Komputer dan Multimedia	0	2	2	Institut
8.	SKP 020108	Praktikum Etiket dan Protokoler	0	2	2	Institut
9.	SKP 030109	Pengantar Ilmu Politik	2	0	2	Fakultas
10.	SKP 020110	Penanaman Karakter Kepamongprajaan I	0	1	1	Institut

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	KETERANGAN
			TEORI	PRAKTIK/ PRAKTIKUM		
Jumlah			12	7	19	

B. SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	KETERANGAN
			TEORI	PRAKTIK/ PRAKTIKUM		
1.	SKP 010201	Bahasa Indonesia	2	0	2	MK Wajib Nasional
2.	SKP 020202	Sistem Pemerintahan Indonesia	2	0	2	Institut
3.	SKP 020203	Desa dan Kelurahan	2	0	2	Institut
4.	SKP 020204	Kepamongprajaan dan Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia	2	0	2	Institut
5.	SKP 020205	Praktikum Tata Naskah Dinas	0	2	2	Institut
6.	SKP 030206	Praktikum Penulisan Akademik	0	1	1	Fakultas
7.	SKP 040207	Pengantar Ilmu Administrasi Publik	2	0	2	Prodi
8.	SKP 020208	Penanaman Karakter Kepamongprajaan II	0	1	1	Institut
9.	SKP 020209	Magang Pemerintahan Pratama	0	6	6	Institut
Jumlah			10	10	20	

C. SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	KETERANGAN
			TEORI	PRAKTIK/ PRAKTIKUM		
1.	SKP 020301	Sistem Politik Indonesia	2	0	2	Institut
2.	SKP 020302	Pelayanan Publik dan Governansi Digital	2	0	2	Institut
3.	SKP 020303	Administrasi Kependudukan	2	0	2	Institut
4.	SKP 020304	Praktikum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	0	2	2	Institut
5.	SKP 020305	Praktikum Bahasa Inggris II (<i>Intermediate</i>)	0	2	2	Institut
6.	SKP 030306	Kebijakan Publik	2	0	2	Fakultas
7.	SKP 040307	Hukum dan Kebijakan	2	0	2	Prodi
8.	SKP 040308	Ekonomi dan Kebijakan	2	0	2	Prodi
9.	SKP 020309	Penumbuhan Karakter Kepamongprajaan I	0	1	1	Institut
Jumlah			12	5	17	

D. SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	KETERANGAN
			TEORI	PRAKTIK/ PRAKTIKUM		
1.	SKP 020401	Manajemen Aparatur Sipil Negara	2	0	2	Institut
2.	SKP 020402	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	3	0	3	Institut
3.	SKP 040403	Politik dan Kebijakan	2	0	2	Prodi

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	KETERANGAN
			TEORI	PRAKTIK/ PRAKTIKUM		
4.	SKP 040404	Teori dan Perkembangan Governansi	2	0	2	Prodi
5.	SKP 040405	Ekologi Kebijakan	2	0	2	Prodi
6.	SKP 020406	Penumbuhan Karakter Kepamongprajaan II	0	1	1	Institut
7.	SKP 020407	Magang Pemerintahan Muda	0	8	8	Institut
Jumlah			11	9	20	

E. SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	KETERANGAN
			TEORI	PRAKTIK/ PRAKTIKUM		
1.	SKP 020501	Metodologi Penelitian	2	0	2	Institut
2.	SKP 020502	Praktikum Statistika	0	2	2	Institut
3.	SKP 020503	Praktikum Penulisan dan Publikasi Ilmiah	0	2	2	Institut
4.	SKP 020504	Praktikum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	0	2	2	Institut
5.	SKP 020505	Praktikum Bahasa Inggris III (<i>Advance</i>)	0	2	2	Institut
6.	SKP 040506	Komunikasi Kebijakan	2	0	2	Prodi
7.	SKP 040507	Anggaran dan Kebijakan	2	0	2	Prodi
8.	SKP 040508	Praktikum Formulasi Kebijakan	0	2	2	Prodi

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	KETERANGAN
			TEORI	PRAKTIK/ PRAKTIKUM		
9.	SKP 040509	Praktikum Pemodelan Kebijakan	0	2	2	Prodi
10.	SKP 040510	Praktikum Peramalan Kebijakan	0	2	2	Prodi
11.	SKP 020511	Pengembangan Karakter Kepamongprajaan I	0	1	1	Institut
Jumlah			6	15	21	

F. SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	KETERANGAN
			TEORI	PRAKTIK/ PRAKTIKUM		
1.	SKP 020601	Kerjasama dan Kolaborasi Pemerintahan	2	0	2	Institut
2.	SKP 020602	Praktikum Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0	2	2	Institut
3.	SKP 020603	Praktikum Perencanaan Anggaran Daerah	0	2	2	Institut
4.	SKP 040604	Praktikum Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif	0	2	2	Prodi
5.	SKP 040605	Praktikum Pengumpulan dan Analisis Data Kuantitatif	0	2	2	Prodi
6.	SKP 040606	Praktikum Implementasi Kebijakan	0	2	2	Prodi
7.	SKP 040607	Praktikum Evaluasi Kebijakan	0	2	2	Prodi
8.	SKP 020608	Pengembangan Karakter Kepamongprajaan II	0	1	1	Institut
9.	SKP 020609	Magang Pemerintahan Madya	0	8	8	Institut

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	KETERANGAN
			TEORI	PRAKTIK/ PRAKTIKUM		
Jumlah			2	21	23	

G. SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	KETERANGAN
			TEORI	PRAKTIK/ PRAKTIKUM		
1.	SKP 020701	Pengawasan Pemerintahan Daerah	2	0	2	Institut
2.	SKP 020702	Kewirausahaan dan Inovasi Pemerintahan	2	0	2	Institut
3.	SKP 020703	Seminar Usulan Penelitian	0	2	2	Institut
4.	SKP 020704	Praktikum Bahasa Inggris IV (<i>Professional</i>)	0	2	2	Institut
5.	SKP 040705	Analisis Kebijakan Publik	2	0	2	Prodi
6.	SKP 040706	Praktikum Penelitian Kebijakan	0	2	2	Prodi
7.	SKP 040707	Praktikum Teknik Pengambilan Keputusan	0	2	2	Prodi
8.	SKP 020708	Pendewasaan Karakter Kepamongprajaan I	0	1	1	Institut
Jumlah			6	9	15	

H. SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		TOTAL SKS	KETERANGAN
			KULIAH	PRAKTIK/ PRAKTIKUM		
1.	SKP 020801	Bhakti Karya Praja/Latsitarda	0	6	6	Institut
2.	SKP 020802	Skripsi/Tugas Akhir	0	4	4	Institut
3.	SKP 020803	Pendewasaan Karakter Kepamongprajaan II	0	1	1	Institut
Jumlah			0	11	11	

NO	JENIS SKS	JUMLAH	PERSENTASE
1.	SKS Teori	59	40
2.	SKS Praktikum	87	60
Total SKS		146	100

NO	JENIS MK	JUMLAH SKS	JUMLAH MK
1.	MK INSTITUT	105	45
2.	MK FAKULTAS	5	3
3.	MK PRODI	36	18
Jumlah		146	66



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Adm. Hukum, Kepegawaian,
dan Hubungan Masyarakat

Dr. Agus Toyib, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196808271990031003

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd

HALILUL KHAIRI